



**RENCANA KERJA  
(RENJA TAHUN 2022)**



**INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas pimpinan, tuntunan dan perlindunganNya sehingga penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja ini memperhatikan dan mempedomani Rencana Strategis Inspektorat 2019-2023. Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, akan menjadi pedoman dan acuan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara agar mengemban tugas dan pembinaan dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi secara optimal serta mempunyai kontribusi yang nyata dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Sumatera Utara **"Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat"**.

Saran ataupun masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari semua pihak agar penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Rencana Kerja Tahun 2022 ini dapat memberi manfaat bagi kita semua seperti yang diharapkan.



Medan, 1 September 2021  
INSPEKTOR PROVINSI SUMATERA UTARA

**LASRO MARBUN**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641201 198701 1 002

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	.....	i
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Landasan Hukum.....	2
	C. Maksud dan Tujuan.....	3
	D. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.....	6
	A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 dan Capaian Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.....	6
	B. Analisis Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.....	32
	C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.....	37
	D. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.....	42
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2022.....	51
	A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	51
	B. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Provsu.....	51
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	54
BAB V	PENUTUP.....	65

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam setiap langkah/kegiatan organisasi karena perencanaan mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis terhadap tercapainya tujuan organisasi. Perencanaan mengarahkan organisasi bergerak sesuai dengan arah dan tujuan yang dikehendaki oleh organisasi, sehingga dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan dari langkah-langkah atau kegiatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, perencanaan harus disusun secara cermat dengan memperhatikan situasi kondisi yang berkembang saat ini dan situasi yang akan datang sehingga perencanaan tidak saja mampu menjawab permasalahan saat ini akan tetapi juga mampu menjawab permasalahan yang akan datang.

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan usulan awal bagi Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan ke dalam rancangan KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022;
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah;

Penyusunan Renja Inspektorat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan didasarkan pada Program/Kegiatan Renstra Inspektorat Provinsi Tahun 2019-2023 tahun ke 4.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan segala perubahannya;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan perubahannya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN.**

#### 1. Maksud.

Renja Inspektorat ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (P.Renstra) Inspektorat Tahun 2021-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sumatera Utara sesuai dengan kedudukan, tugas

dan fungsi Inspektorat. Adapun maksud dari Renja Inspektorat ini antara lain :

- a. Menjabarkan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi untuk Tahun 2022
- b. Merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang selaras dengan Renstra Inspektorat Tahun 2019-2023.

## 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Awal Rencana Kerja Inspektorat ini adalah:

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Inspektorat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Inspektorat Tahun 2022;
- c. Meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Inspektorat untuk kurun waktu 2022 setelah melakukan evaluasi atas rencana kerja tahun 2020.

## D. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 terdiri dari:

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

### BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2020

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 dan Capaian Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
- D. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT PROVSU

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

**BAB II****HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2020****A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 dan Capaian Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara**

Pada tahun 2020 Inspektorat Provinsi Sumatera Utara melalui dana APBD tahun 2020 telah melaksanakan 5 Program dan 58 kegiatan (setelah refocusing dan perubahan APBD TA. 2020). Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara merupakan program teknis yang mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efisien, efektif dan ekonomis serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan anggaran yang disediakan dalam rangka pencapaian target sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 (setelah perubahan APBD) seluruhnya mencapai Rp.51.369.112.372,-. Jumlah anggaran Belanja Tidak Langsung tahun 2020 sebesar Rp 33.010.572.000,- dengan realisasi sebesar Rp 31.999.682.963,-. Jumlah anggaran Belanja Langsung tahun 2020 sebesar Rp. 18.358.540.372,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.454.499.704,-. Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dan Capaian RENSTRA dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel T-C. 29 (a)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020**  
**Provinsi Sumatera Utara**

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) *)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Perkantoran</b>			<b>100%</b>		
4.02.01.01.133	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang didistribusikan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00
4.02.01.01.134	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00
4.02.01.01.135	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Periode ketersediaan jasa administrasi perkantoran	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00
4.02.01.01.136	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode tersedianya jasa kebersihan dan keamanan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00
4.02.01.01.137	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) *	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
4.02.01 . 01 . 138	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan cetakan dan penggandaan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00
4.02.01 . 01 . 139	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00
4.02.01 . 01 . 140	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan dan bahan bacaan yang tersedia	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00
4.02.01 . 01 . 141	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah jenis makan dan minuman yang tersedia	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00
4.02.01 . 01 . 142	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah jenis rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>100%</b>		
4.02.01 . 02 . 67	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya laptop, komputer, printer, proyektor, kamera, handycam dan ac	30 Paket	30 Unit	73 Unit	73 Unit	100.00
4.02.01 . 02 . 68	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubiler kantor	19 Paket	47 Unit	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) *)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
4.02.01 . 02 . 69	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	20 Paket	3 Paket	12 Bulan	12 Bulan	100.00
4.02.01 . 02 . 70	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dan terpeliharanya kendaraan dinas	110 Unit	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00
4.02.01 . 02 . 71	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00
4.02.01 . 02 . 67	Pengadaan Peralatan Penunjang Pengawasan	Jumlah peralatan penunjang pengawasan	8 Paket	0 Paket	0 Unit	-	-
4.02.01 . 02 . 67	Perayaan Hari Hari Besar Keagamaan	Jumlah perayaan hari hari besar keagamaan	4 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100.00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Meningkatnya disiplin ASN</b>			<b>100%</b>		
4.02.01 . 03	Pengadaan Pakaian Dinas	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas	750 Orang	150 Orang	150 Orang	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) *)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>			<b>100%</b>		
4.02.01 . 05 . 38	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	SDM yang mengikuti Sosialisasi	15 Orang	150 Orang	0 Orang	-	-
4.02.01 . 05 . 39	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kemampuan melalui bimtek	100 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100.00
4.02.01 . 05 . 40	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah aset yang terpelihara	10 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00
4.02.01 . 05 . 41	Bimbingan Jasmani PNS di Lingkungan Inspektorat	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kemampuan fisik	60 Bulan	150 Orang	150 Orang	-	-
4.02.01 . 05 . 42	Pengolahan Data SIMPEG	Periode pengolahan data SIMPEG	60 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) *)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
4.02.01 . 05 . 43	Family Gathering Inspektorat Provsu	Jumlah SDM Inspektorat yang meningkat motivasi kerja	5 Kegiatan	200 Orang	200 Orang	-	-
4.02.01 . 05 . 44	Pengembangan sistem informasi manajemen pengawasan terintegrasi	Jumlah Aplikasi yang berkembang Pengelolaannya	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	100.00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>100%</b>		
4.02.01 . 06 . 47	Penyusunan Renja dan P.Renja, RKA Tahunan dan RKA-P, DPA dan DPPA serta Renstra SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yg disusun	40 Laporan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100.00
4.02.01 . 06 . 48	Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	Jumlah laporan keuangan Semesteran yg disusun	5 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) *)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
4.02.01 . 06 . 49	Penyusunan LKPJ dan LPPD	Jumlah Laporan LKPJ dan LPPD yang disusun	5 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00
4.02.01 . 06 . 50	Penyusunan CaLK, LRA dan NERACA	Jumlah Laporan CAL, LRA dan Neraca	5 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
4.02.01 . 06 . 51	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Keuangan Tahunan yg dibuat	60 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00
4.02.01 . 06 . 52	Komparasi Program/Kegiatan Inspektorat Keluar Provinsi Sumatera Utara	Laporan Perbandingan Program Kegiatan yang dibuat	8 Orang	1 Dokumen		-	-
	<b>Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara</b>	<b>Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan dicintai, Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, adil dan terpercaya</b>			<b>100%</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) *)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
4.02.01 . 32. 42	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	120 Laporan	150 Orang	150 Orang	30 Orang	20.00
4.02.01 . 32. 43	Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah	Dokumen PKPT antara Inspektorat Provsu dan Inspektorat Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00
4.02.01 . 32. 44	Koordinasi dan Konsultasi Program Pengawasan dan Tugas Lain dengan Kantor Kementerian, Setneg serta Itjen Kementerian dan Inspektorat Provinsi Lainnya	Laporan Hasil Koordinasi Program Pembinaan dan Pengawasan	75 Orang	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	100.00
4.02.01 . 32. 49	Survey Penilaian Integritas dan Kepuasan Masyarakat	Nilai/Skor/Opini Integritas	4 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	0.00
4.02.01 . 32. 50	Pemeriksaan Tujuan Tertentu	Jumlah Pemeriksaan Tertentu Yang Ditindaklanjuti	63 Kegiatan	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) *)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
4.02.01 . 32. 51	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	305 Kasus	50 Kasus	50 Kasus	50 kasus	83.33
4.02.01 . 32. 52	Pembinaan dan Pengawasan Umum Teknis oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	132 Laporan	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	-	-
4.02.01 . 32. 53	Pembinaan dan Pengawasan OPD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Audit Kinerja)	Jumlah OPD yang dibina dan diawasi untuk mencapai Opini WTP	164 OPD	54 OPD	54 OPD	48 OPD	100.00
4.02.01 . 32. 54	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	Skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3	3	2.8	2,9	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) *)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
4.02.01 . 32. 55	Monitoring Persiapan Pelaksanaan dan Evaluasi Terhadap Penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provsu	Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	15 Kegiatan	81,67%	82%	83,64%	100.00
4.02.01 . 32. 56	Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Skor Evaluasi Sistem Akuntabilitas Pemerintah	290 Laporan	B	B	B	100.00
4.02.01 . 32. 57	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Kegiatan	WTP.	WTP.	WTP.	100.00
4.02.01 . 32. 58	Reviu Dokumen Perencanaan dan Pembangunan serta Pelaksanaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Jumlah laporan reviu dokumen perencanaan dan pembangunan	60 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00
4.02.01 . 32. 59	Monitoring dan Evaluasi TLHP Inspektorat Provinsi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	Persentase capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat pada Pemerintahan Kab/Kota	60 Bulan	100%	100%	100%	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) *)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
4.02.01 . 32. 60	Penunjang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara	Periode terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	430 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100.00
4.02.01 . 32. 61	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	Persentase penyelesaian TLHP Itjen Kemendagri	15 Kegiatan	100%	100%	100%	100.00
4.02.01 . 32. 62	Pemeriksaan penggunaan dana BOS SMA/SMK se-Sumatera Utara	Jumlah SMK/SMA yang diperiksa	67 Sampel	60 Sekolah	60 Sekolah	60 Sekolah	100.00
4.02.01 . 32. 63	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah OPD yang dievaluasi Pelayanan Publik	57 Kegiatan	40 OPD	40 OPD	40 OPD	100.00
4.02.01 . 32. 64	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persentase penyelesaian TLHP Inspektorat pada OPD	15 Kegiatan	100 %.	100 %.	100 %.	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) *)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
4.02.01 . 32. 65	Monitoring dan Evaluasi LHKPN/LHKASN di Lingkungan Pemprovsu	Jumlah ASN yang dilakukan evaluasi terhadap LHKPN/LHKASN	250 Berkas	150 Pejabat	150 Pejabat	150 Pejabat	100.00
4.02.01 . 32. 66	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa	Jumlah desa yang dilaksanakan pengawasan dan pengelolaan dana desa	270 Sampel	24 Desa	0 Desa	-	-
4.02.01 . 32. 67	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Peresentase penyelesaian kasus pengedudukan masyarakat	20 Kali	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100.00
4.02.01 . 32. 68	Pendukung Kegiatan Sekretariat JFA /P2UPD	Periode terlaksananya kegiatan sekretariat JFA/P2UPD	20 Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100.00
4.02.01 . 32. 70	Peran serta Inspektorat dalam RAKORWASNAS	Laporan Hasil Pelaksanaan Rakorwasnas	5 Kegiatan	8 Orang	8 Orang	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) *)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
4.02.01 . 32. 71	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Reformasi Birokrasi & Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	Nila Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	20 Kegiatan	B	B	B	100.00
4.02.01 . 32. 72	Peningkatan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Level dan Nilai SPIP Pemprovsu	Level 4	1 Tahun	3	Level 3 terdefenisi	100.00
4.02.01 . 32. 73	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data TLHP Inspektorat Provinsi dengan OPD di Lingkungan Pemeritnah Provinsi Sumatera Utara	Persentase penyelesaian TLHP Inspektorat pada OPD	15 Kegiatan	75%	77%	78,87%	100.00
4.02.01 . 32. 74	Rapat Koordinasi Pembahasan TLHP BPK dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persentase penyelesaian TLHP BPK RI	15 Kegiatan	81,67%	82 %.	83,64 %.	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) *)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
4.02.01 . 32. 75	Pra Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Itjen Depdagri dan Departemen lainnya serta Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian TLHP Itjen Kemendagri	5 Kegiatan	100 %.	-	-	-
4.02.01 . 32. 76	Rapat Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri dan Pengaduan Masyarakat	Persentase penyelesaian TLJP Itjen dan Pengaduan Masyarakat'	5 Kegiatan	100 %.	100 %.	100 %.	100.00
4.02.01 . 32. 77	Koordinasi dan Pendampingan terhadap pemeriksaan yang dilakukan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persentase penyelesaian TLHP BPK RI	5 Kegiatan	81,67%	82 %.	83,64 %.	127.53
4.02.01 . 32. 78	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data TLHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	Persentase penyelesaian TLHP Inspektorat pada Inspektorat Kabupaten/Kota	15 Kegiatan	75%	77%	78,87%	7.28

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) *)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
4.02.01 . 32. 79	Rapat Koordinasi Pembahasan dan Penyusunan Peta Pengawasan/PKPT Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	Dokumen PKPT yang disepakati dengan Kab/Kta	5 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
4.02.01 . 32. 80	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peta Pengawasan/PKPT dan Penerapan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	Jumlah kesesuaian PKPT	20 Kegiatan	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100.00
4.02.01 . 32. 81	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Auditor dan P2UPD serta Fungsional Umum	Jumlah Auditor, P2UPD dan Fungsional Umum yang mengikuti peningkatan kompetensi	125 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	100.00
4.02.01 . 32. 82	Sekretariat Rencana aksi program koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK-RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Periode terlaksananya sekretariat terlaksananya koordinasi pencegahan korupsi	20 Kali	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) *)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
4.02.01 . 32. 83	Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Sumatera Utara	Periode terlaksananya pencegahan sapu bersih	20 Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00
4.02.01 . 32. 84	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Responsiv Gender	Jumlah OPD yang manganggarkan Responsiv Gender	5 Kegiatan	49 OPD	0 OPD	-	-
4.02.01 . 32. 85	Peningkatan Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	Level 4	Level 2 menuju level 3	Level 2 menuju level 3 dengan peningkatan nilai	Level 2 Plus	100.00
4.02.01 . 32. 86	Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stratnas-PK) dan Strasda pada Provinsi Sumatera Utara	Nilai pencapaian Stranas PK)	20 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100.00
4.02.01 . 32. 87	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar daerah dalam Pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah Inspektorat Daerah lainnya yang dilakukan telaahan sejawat	55 Orang	2 Kab/Kota	0 Kab/Kota	-	-

\*) Catatan : Indikator Kinerja pada Rencana Kerja (Renja) telah disesuaikan dengan output kegiatan.

Tabel T-C. 29 (b)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
Provinsi Sumatera Utara**

**Nama Perangkat Daerah : Inspektorat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri No. 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (P. RENSTRA) Tahun 2021-2023	Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>INSPEKTORAT PROVINSI</b>					
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			12 Bulan		
<b>6.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen Perencanaan dan Penganggaran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen renstra dan renja	6 Dokumen	2 Dokumen		
6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	3 Dokumen	1 Dokumen		
6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA	3 Dokumen	1 Dokumen		
6.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	3 Dokumen	1 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri No. 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (P. RENSTRA) Tahun 2021-2023	Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen		
6.01.01.1.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja	3 Laporan	1 Dokumen		
<b>6.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Laporan keuangan dan kegiatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	42 Bulan	14 Bulan		
6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Laporan	1 Laporan		
6.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 Laporan	1 Laporan		
<b>6.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Laporan penatausahaan barang</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
6.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan barang	6 Laporan	6 Laporan		
<b>6.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya data administrasi ASN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
6.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Data administrasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen		
6.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Data sistem informasi kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen		
6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Penilaian angka kredit APIP	1 Dokumen	1 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri No. 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (P. RENSTRA) Tahun 2021-2023	Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai	40 orang	40 orang		
6.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	5 orang	5 orang		
<b>6.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%		
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%		
6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	100%	100%		
6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor	100%	100%		
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%		
6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%		
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan		
<b>6.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya fasilitas operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
6.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel dan alat kantor lainnya	100%	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri No. 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (P. RENSTRA) Tahun 2021-2023	Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	3 buah	3 buah		
<b>6.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat	25.000 surat	25.000 surat		
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan		
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	12 Laporan		
<b>6.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Laporan	1 Laporan		
6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Laporan	1 Laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri No. 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (P. RENSTRA) Tahun 2021-2023	Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan		
6.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan		
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>					
<b>6.01.02.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>		
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase nilai rata-rata kinerja PD berdasarkan skala pengukuran kinerja	60%	60%		
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah	15 Laporan	15 Laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri No. 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (P. RENSTRA) Tahun 2021-2023	Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil rewiuw terhadap LPPD dan Lakip Jumlah laporan hasil rewiu terhadap realisasi capaian output DAK	6 Dokumen	6 Dokumen		
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil rewiu terhadap LKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemeriksaan pengawasan umum dan teknis pemerintah Kab/Kota	4 aspek pengawasan umum dan 3 urusan pengawasan teknis	4 aspek pengawasan umum dan 3 urusan pengawasan teknis		
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan evaluasi SAKIP Kab/Kota dan PD serta Nilai EKPPD Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen		
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI	83%	83%		
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri	100%			
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP	50%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri No. 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (P. RENSTRA) Tahun 2021-2023	Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat	79%			
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat	72%			
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kementerian dan Inspektorat Utama Lembaga	50%			
		Jumlah Laporan Pengawasan/Pemeriksaan atas Kepatuhan	5 Laporan			
		Jumlah Laporan Pengawasan/Pemeriksaan atas Dana BOS	18 Laporan			
		Jumlah Laporan Pengawasan/Pemeriksaan atas Dana Desa	22 Laporan			
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat, limpahan instansi tingkat atas dan permintaan instansi terkait	72%	68%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri No. 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (P. RENSTRA) Tahun 2021-2023	Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Daerah/Negara	2 Laporan	1 Laporan		
6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan/ Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhimya masa jabatan Kepala Daerah Kab/Kota	72%	20 Laporan		
		Jumlah laporan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Serah Terima jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP)/Pejabat Administrator	13 Laporan			
		Jumlah Laporan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Pelayanan Dumas	25 Laporan			
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Permintaan/Permohonan dari APH	25 Laporan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri No. 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (P. RENSTRA) Tahun 2021-2023	Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Pelimpahan/Penugasan dari Kementerian/Lembaga	25 Laporan			
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Penyelesaian Kerugian Daerah	4 Laporan			
		Jumlah laporan hasil probity audit	5 Laporan			
		Jumlah laporan hasil audit investigasi	3 Laporan			
		Jumlah laporan hasil audit forensik	7 Laporan			
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>					
<b>6.01.03.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Jumlah dokumen terkait kebijakan teknis pengawasan dan pembinaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan:	Tersedianya Program kerja pembinaan dan pengawasan tahunan (PKP2T)	1 Dokumen	1 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri No. 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (P. RENSTRA) Tahun 2021-2023	Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
					Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra PD s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan:	1.Level Kapabilitas APIP 2.Level Maturitas SPIP	1.Kapabilitas APIP Level 3+ 2.Maturitas SPIP Level 3,5	1.Kapabilitas APIP Level 3 2.Maturitas SPIP Level 3,25		
<b>6.01.03.1.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan serta kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemerintah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Pembinaan pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh Perangkat Daerah)	12 Laporan	11 Laporan		
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8 Laporan	8 Laporan		
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai MCP KPK	91	90		
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	nilai SPI	61	60		

Langkah dan upaya yang dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan kinerja tahun 2020 adalah:

1. Terkait dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara, ada perubahan susunan organisasi baru, sehingga perlu adanya konsolidasi ulang pembagian tugas kerja di internal struktur organisasi Inspektorat;
2. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tematik dan berbasis risiko dengan lebih meningkatkan aspek kehati-hatian terhadap distribusi SDM dan anggaran, sehingga dengan SDM dan anggaran yang terbatas, semua tujuan dan sasaran Inspektorat bisa dicapai pada akhir tahun;
3. Provinsi Sumatera Utara menurut opini BPK memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun 2020, laporan kinerja telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemprov Sumut tanggal 31 Desember 2020. Selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut Provinsi Sumatera Utara mendapatkan opini WTP dan diharapkan dapat mempertahankan pencapaian tersebut dengan peningkatan kapasitas dan kualitas dalam melakukan reviu laporan keuangan.
4. Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 telah mencapai Level 3 terdefenisi, sehingga masih diperlukan upaya-upaya pengimplementasian dan pemenuhan yang signifikan dari level 3 dengan nilai capaian 3,226. Dengan tercapainya level 3 SPIP maka APIP diharapkan lebih efektif melakukan pendampingan kepada seluruh counterpart pada setiap OPD, BUMD dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan SPIP sekurang-kurangnya pada maturitas level 3.
5. Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 memiliki capaian Level 2 Plus, sehingga sampai dengan saat ini masih dilakukan upaya-upaya perbaikan guna meningkatkan level capaian dari level 2 (dua) plus menjadi level 3 (tiga) di tahun 2021.

## **B. Analisis Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara**

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, maka Rencana Target Capaian Kinerja

Tahun 2020 dan realisasi sesuai dengan sasaran dan target kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	1.	Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP	WTP
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	2.	a. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	82 %	83,64%
			b. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%
			c. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat pada OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	77%	78,87%
3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	3.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP No. 60 Tahun 2008, unsur pengendalian terdiri dari 5 unsur yaitu : Lingkungan pengendalian Penilaian Resiko Kegiatan Pengendalian Informasi dan Komunikasi Pemantauan dan	Level 3	Level 3 terdefenisi

			Pengendalian Internal		
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	4.	Meningkatnya level kapabilitas APIP Inspektorat sesuai Perka BPKP No. 16 Tahun 2015, kapabilitas diukur dari 6 elemen area perubahan yaitu: Peran dan layanan manajemen SDM Praktik Profesional Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja Hubungan dan Budaya Organisasi Struktur Tatakelola	Level 2 menuju level 3 dengan peningkatan nilai	Level 2 Plus

Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan:

1. Inspektorat sudah menyiapkan Tim Reviu yang kompeten dan telah dibekali pengetahuan;
2. Koordinasi yang terus menerus dengan BPK-RI Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Memberikan bimbingan penyusunan pelaporan keuangan berbasis akrual dan asistensi *stock opname* barang ke seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
4. Inspektorat terus melakukan monitoring secara berkala untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
5. Koordinasi yang *intensive* dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
6. Inspektorat terus melakukan monitoring secara berkala untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri.
7. Koordinasi yang *intensive* dengan Itjen Kemendagri.
8. Inspektorat terus melakukan monitoring secara berkala dan melakukan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
9. Koordinasi yang *intensive* dengan OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala/hambatan tersebut.

Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara selama Tahun 2020.

### **1. Temuan Tahun Anggaran 2020 Dan Tindak Lanjut.**

Dalam rangka menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan, baik temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK-RI, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong OPD terkait dengan temuan agar melaksanakan tindak lanjut temuan-temuan di OPD nya masing-masing. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain selama tahun 2020 telah dilakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut sebanyak 6 (enam) kali, yaitu 3 (tiga) kali dengan Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) kali dengan seluruh OPD/BUMD Pemprovsu. Adapun hasil tindak lanjut yang dilakukan terhadap temuan-temuan Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

#### *a. Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provsu.*

##### 1. OPD dan BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Persentase penyelesaian tindak lanjut OPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 sebesar 84,96%. Status tindak lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provsu pada 53 OPD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020 sebanyak 4.475 rekomendasi dengan nilai Rp. 40.151.341.370,22,- yang terdiri dari :

- a) Rekomendasi bersifat administrasi sebanyak 3.815
- b) Rekomendasi bersifat kerugian daerah sebanyak 660

Status tindak lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provsu pada 53 OPD/BUMD yang masih dalam proses dan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 296 rekomendasi yang terdiri dari :

- a) Rekomendasi bersifat administrasi sebanyak 222
- b) Rekomendasi bersifat kerugian daerah sebanyak 74

Status tindak lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provsu pada 53 OPD/BUMD yang belum ditindak lanjuti sampai dengan tahun 2020 sebanyak 377 rekomendasi dengan nilai yang terdiri dari:

- a) Rekomendasi bersifat administrasi sebanyak 306.

b) Rekomendasi bersifat kerugian daerah sebanyak 71.

## 2. Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Persentase penyelesaian tindak lanjut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 sebesar 72,77%. Status tindak lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provsu pada 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020 sebanyak 6.927 rekomendasi dengan nilai Rp. 164.064.180.595,89 yang terdiri dari:

- a) Rekomendasi bersifat administrasi sebanyak 5.629.
- b) Rekomendasi bersifat kerugian daerah sebanyak 1.328.

Status tindak lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provsu pada Kabupaten/Kota yang masih dalam proses sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1.319 rekomendasi dengan nilai Rp.114,780,328,333.11,- yang terdiri dari:

- a) Rekomendasi bersifat administrasi sebanyak 990.
- b) Rekomendasi bersifat kerugian daerah sebanyak 329.

Status tindak lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provsu pada Kabupaten/Kota yang belum ditindak lanjuti sampai dengan tahun 2020 sebanyak 597 rekomendasi dengan nilai Rp. 22,715,743,104.50,- yang terdiri dari:

- a) Rekomendasi bersifat administrasi sebanyak 501.
- b) Rekomendasi bersifat kerugian daerah sebanyak 96.

### b. Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal kementerian dalam negeri Tahun 2020 sebesar 100 %. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2019 terdapat 18 temuan dan 29 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut, seluruhnya telah selesai ditindak lanjuti.

Uraian tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Temuan	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		
			Belum	Proses	Selesai
2019	18	29	-	-	29

### c. Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provsu

Dari hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provsu terhadap LKPD Pemprovsu TA. 2019 pada 49 OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, terdapat 577 temuan dan 1.522 rekomendasi. Tindak Lanjut yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Kategori Selesai (S) : 1.273 (83,64%)
- 2) Kategori Dalam Proses (D) : 207 (13,6%)
- 3) Kategori belum ditindaklanjuti (B) : 13 (0,85%)
- 4) Kategori tidak dapat ditindaklanjuti (T) : 29 (1,91%)

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil pemutakhiran per-Desember 2020 sebesar 83,64%.

#### d. Kasus Pengaduan Masyarakat

Persentase hasil penanganan kasus serta pengaduan masyarakat pada SKPD Provinsi dan Kab/Kota dan limpahan instansi tingkat atas tahun 2020 sebesar 74,5% dengan rincian jumlah pengaduan masyarakat sebanyak 353 kasus yang masuk hingga akhir tahun 2020 dan yang ditindak lanjuti sebanyak 263 pengaduan.

Uraian tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Jumlah Pengaduan	Tindak lanjut	Persentase
2020	353	263	74,5 %

### C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat yaitu :

#### a. Upaya Mempertahankan Dan Meningkatkan Kualitas Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan mendorong tercapainya Opini WTP pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika Pemerintah

Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK. Mengingat Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan opini WTP, maka ini menjadi tantangan serius bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas opini LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu perlu perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar peran Inspektorat saat ini dan kedepan dalam revidi laporan keuangan yang dibuat oleh Perangkat Daerah perlu didukung dengan optimal. Komitmen ini sejalan dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tugas dan fungsi Inspektorat selaku GWPP pada Kabupaten/Kota mengharuskan Inspektorat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Kabupaten/Kota guna tercapainya laporan keuangan yang baik pada Kabupaten/Kota sehingga dapat memperoleh opini WTP.

**b. Masih Lemahnya SPIP di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara**

Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

**c. Tuntutan Penerapan Prinsip Tata Pemerintahan Yang *Good Governance* dan *Clean Governance*.**

Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Negara/daerah yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi.

**d. Dampak Penggunaan Dana BOS Untuk Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi**

Penggunaan dana BOS memberikan manfaat yang sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan di Indonesia, namun tidak jarang

dana BOS yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan terkadang sering diselewengkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, dinyatakan bahwa evaluasi terhadap penggunaan dana bos menjadi salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

**e. Dampak Penerapan Undang-Undang Desa**

Pengesahan Undang-Undang Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 didasarkan pertimbangan percepatan akselerasi pembangunan desa. Salah satu hal yang penting dalam implementasi ketentuan tersebut adalah Alokasi Anggaran untuk Desa (ADD). Hal yang perlu dipersiapkan aparat desa yaitu tata kelola pemerintahan desa, mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa yang disederhanakan dengan tidak meninggalkan aturan yang ada, dan penguatan kapasitas aparat desa. Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Desa tersebut, perlu pembinaan dan pengawasan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara selaku APIP, terutama dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana ADD yang diterima oleh setiap desa di Provinsi Sumatera Utara.

**f. Pergeseran paradigma pengawasan APIP**

Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada SKPD sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*. Perbedaan paradigma lama (pendekatan tradisional) dengan paradigma baru (pendekatan baru) tampak seperti pada tabel dibawah ini:

**Perbedaan Paradigma Lama dan Paradigma Baru**

URAIAN	PARADIGMA LAMA	PARADIGMA BARU
Peran	Watchdog	Konsultan dan Katalis
Pendekatan	Detektif (Mendeteksi Masalah)	Preventif (Mencegah masalah)
Sikap	Bertindak seperti polisi	Sebagai mitra/ pelanggan
Fokus	Kelemahan/ penyimpangan	Penyelesaian yang konstruktif
Komunikasi	Terbatas	Reguler

dengan manajemen SKPD		
Jenis Audit	Financial/ compliance audit	Financial, Compliance, Operasional Audit

Tahun 2021, Inspektorat telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan perbandingan persentase 50% pembinaan dan 50% pengawasan.

**g. Terdapat Dua Jenis Fungsional Pengawasan Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara**

Saat ini pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terdapat dua jenis fungsional pengawasan yaitu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pejabat Fungsional Auditor (PFA). P2UPD berada di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri, sedangkan untuk JFA berada di bawah pembinaan BPKP. Perlu adanya kejelasan yang tegas untuk pengaturan pola hubungan kerja antara P2UPD dengan JFA, sehingga dalam pelaksanaan penugasan dilapangan dapat lebih bersinergi.

**h. Rendahnya Capaian Prestasi SAKIP dan LPPD**

Sebagaimana diketahui capaian prestasi SAKIP dan LPPD Provinsi Sumatera Utara masih rendah misalnya untuk LPPD Tahun Anggaran 2020, LPPD Sumatera Utara menduduki urutan 33 (tiga puluh tiga) dari 34 (tiga puluh empat) provinsi dan SAKIP baru nilai B. Capaian merupakan salah satu tantangan bagi Inspektorat bersama OPD terkait. SAKIP dan LPPD sebaiknya bias mengimbangi LKPD yang sudah beberapa kali WTP.

SAKIP dan LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara bagian dari perhatian Inspektorat dalam kurun waktu 2019-2023. Inspektorat sesuai kedudukan, tugas dan fungsi akan berupaya meningkatkan capaian saat ini. Upaya dilakukan secara mandiri dan koordinasi dengan OPD terkait.

**i. Semakin meningkatnya perhatian dan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Mulai era reformasi pada tahun 1998 perhatian dan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota meningkat tajam. Masyarakat telah menyadari bahwa pemerintahan adalah milik dan untuk melayani masyarakat sehingga banyak pengaduan yang disampaikan masyarakat ke Inspektorat untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

**j. Perkembangan Teknologi Informasi dan Media Sosial**

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut berpengaruh terhadap seluruh sendi kehidupan termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan internal pemerintah seperti Inspektorat dapat memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai:

- 1) Sumber data dan informasi awal dan perbaikan;
- 2) Media pengawasan;
- 3) Media Bimbingan Teknis;
- 4) Media Pembinaan; dan
- 5) Media Sosialisasi

**k. Kurang Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Umum dan Teknis Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota**

Kewenangan pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap pemerintahan kabupaten/kota belum maksimal. Keadaan ini dipengaruhi beberapa hal antara lain:

- 1) Pemahaman terhadap kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat baik oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- 2) Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan peraturan terkait lainnya;
- 3) Kemampuan Inspektorat Provinsi dalam menjalankan tugas membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan Pasal 50 jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; dan
- 4) Eforia otonomi daerah.

**l. Anggaran Pembinaan dan Pengawasan yang minim**

Anggaran Inspektorat sangat minim untuk bisa melaksanakan tugasnya secara memadai. Tahun 2020 Anggaran Inspektorat hanya Rp.51.369.112.372,- (lima puluh satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), Tahun 2021 Anggaran Inspektorat sebesar Rp.70.727.615.000,- (tujuh puluh milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian belanja operasi sejumlah Rp 69.936.923.125,- dan Belanja Modal sebesar Rp

790.691.875,- yang terdiri dari 3 program, 12 kegiatan dan 46 sub kegiatan. Rencana Anggaran tahun 2022 yang diusulkan sebesar Rp 129.000.000.000,- (Seratus dua puluh Sembilan milyar rupiah) yang terdiri dari 3 program 12 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Penambahan jumlah anggaran berdasarkan kebutuhan pembinaan dan pengawasan yang lebih luas terutama pada jenis pemeriksaan tertentu, dana BOS, dana desa dan jenis-jenis pemeriksaan lainnya.

**m. Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kurang**

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara saat ini (Mei 2021) hanya mempunyai 107 orang jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) orang Auditor dan 53 (lima puluh tiga) orang P2UPD. Jumlah ini masih sangat kurang dibandingkan cakupan tugas 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota, 48 (empat puluh delapan) OPD, 6 (enam) BUMD, dan Rp.13.700.000.000.000,- (tiga belas triliun tujuh ratus milyar rupiah) APBD. Kebutuhan ideal fungsional tertentu sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sehingga masih dibutuhkan kurang lebih 73 orang fungsional tertentu.

**n. Capaian Kapabilitas APIP dan Indeks Integritas yang masih perlu ditingkatkan.**

Pencapaian Kapabilitas APIP dan Indeks Integritas masih perlu dimaksimalkan pada tahun-tahun berikutnya.

**D. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.**

Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam rancangan awal RKPD merupakan program usulan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel T-C 31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Provinsi Sumatera Utara**

**Nama Perangkat Daerah : Inspektorat**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Sumut			61,399,638,670	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Sumut			61,399,638,670	
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Sumut	<b>Tersedianya dokumen Perencanaan dan Penganggaran</b>	<b>100%</b>	<b>675,000,000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Sumut	<b>Tersedianya dokumen Perencanaan dan Penganggaran</b>	<b>100%</b>	<b>675,000,000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumut	Jumlah Dokumen renstra dan renja	2 Dokumen	150,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumut	Jumlah Dokumen renstra dan renja	2 Dokumen	150,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sumut	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sumut	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	25,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sumut	Jumlah Dokumen perubahan RKA	1 Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sumut	Jumlah Dokumen perubahan RKA	1 Dokumen	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sumut	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sumut	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	30,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumut	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	200,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumut	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	200,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumut	Jumlah evaluasi kinerja	1 Laporan	250,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumut	Jumlah evaluasi kinerja	1 Laporan	250,000,000	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Sumut	<b>Tersedianya Laporan keuangan dan kegiatan</b>	<b>100%</b>	<b>46,007,384,000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Sumut	<b>Tersedianya Laporan keuangan dan kegiatan</b>	<b>100%</b>	<b>46,007,384,000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sumut	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	45,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sumut	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	45,000,000,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sumut	Jumlah Pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	932,384,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sumut	Jumlah Pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	932,384,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumut	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	75,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumut	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	75,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Sumut	<b>Tersedianya Laporan penatausahaan barang</b>	<b>100%</b>	<b>75,000,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Sumut	<b>Tersedianya Laporan penatausahaan barang</b>	<b>100%</b>	<b>75,000,000</b>	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sumut	Jumlah Laporan penatausahaan barang	6 Laporan	75,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sumut	Jumlah Laporan penatausahaan barang	6 Laporan	75,000,000	
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Sumut	<b>Tersedianya data administrasi ASN</b>	<b>100%</b>	<b>3,823,755,200</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Sumut	<b>Tersedianya data administrasi ASN</b>	<b>100%</b>	<b>3,823,755,200</b>	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sumut	Dokumen Data administrasi ASN	1 Dokumen	325,291,200	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sumut	Dokumen Data administrasi ASN	1 Dokumen	325,291,200	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sumut	Dokumen Data sistem informasi kepegawaian	1 Dokumen	72,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sumut	Dokumen Data sistem informasi kepegawaian	1 Dokumen	72,000,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sumut	Dokumen Penilaian angka kredit APIP	1 Dokumen	186,480,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sumut	Dokumen Penilaian angka kredit APIP	1 Dokumen	186,480,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumut	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai	45 orang	3,000,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumut	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai	45 orang	3,000,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sumut	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	7 orang	239,984,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sumut	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	7 orang	239,984,000	
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Sumut	<b>Tersedianya sarana dan prasarana kantor</b>	<b>100%</b>	<b>1,960,988,800</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Sumut	<b>Tersedianya sarana dan prasarana kantor</b>	<b>100%</b>	<b>1,960,988,800</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sumut	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	38,988,800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sumut	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	38,988,800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumut	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	500,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumut	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	500,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sumut	Jumlah Peralatan rumah tangga	100%	150,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sumut	Jumlah Peralatan rumah tangga	100%	150,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumut	Jumlah Bahan logistik kantor	12 Bulan	510,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumut	Jumlah Bahan logistik kantor	12 Bulan	510,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumut	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	146,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumut	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	146,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sumut	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	16,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sumut	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	16,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumut	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 Laporan	600,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumut	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 Laporan	600,000,000	
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Sumut	<b>Tersedianya fasilitas operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>520,250,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Sumut	<b>Tersedianya fasilitas operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>520,250,000</b>	
	Pengadaan Mebel	Sumut	Jumlah mebel dan alat kantor lainnya	100%	500,000,000	Pengadaan Mebel	Sumut	Jumlah mebel dan alat kantor lainnya	100%	500,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumut	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	4 buah	20,250,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumut	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	4 buah	20,250,000	
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Sumut	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4,495,893,200</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Sumut	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4,495,893,200</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumut	Jumlah surat	25.100 surat	90,595,200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumut	Jumlah surat	25.100 surat	90,595,200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumut	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	1,300,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumut	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	1,300,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumut	Pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	3,105,298,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumut	Pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	3,105,298,000	
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Sumut	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3,841,367,470</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Sumut	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3,841,367,470</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sumut	Jumlah Pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Laporan	325,720,484	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sumut	Jumlah Pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Laporan	325,720,484	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sumut	Jumlah Pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Laporan	394,699,878	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sumut	Jumlah Pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Laporan	394,699,878	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sumut	Jumlah Pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Laporan	1,888,957,200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sumut	Jumlah Pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Laporan	1,888,957,200	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sumut	Jumlah Pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Laporan	1,231,989,908	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sumut	Jumlah Pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Laporan	1,231,989,908	
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Sumut			<b>103,445,361,330</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Sumut			<b>103,445,361,330</b>	
1	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Sumut	<b>Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan</b>	<b>83%</b>	<b>83,520,361,330</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Sumut	<b>Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan</b>	<b>83%</b>	<b>83,520,361,330</b>	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Sumut	Persentase nilai rata-rata kinerja PD berdasarkan skala pengukuran kinerja	61%	30,800,000,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Sumut	Persentase nilai rata-rata kinerja PD berdasarkan skala pengukuran kinerja	61%	30,800,000,000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Sumut	Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah	16 Laporan	18,270,361,330	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Sumut	Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah	16 Laporan	18,270,361,330	
	Reviu Laporan Kinerja	Sumut	Jumlah laporan hasil reviu terhadap LPPD dan Lakip Jumlah laporan hasil reviu terhadap realisasi capaian output DAK	6 Dokumen	4,100,000,000	Reviu Laporan Kinerja	Sumut	Jumlah laporan hasil reviu terhadap LPPD dan Lakip Jumlah laporan hasil reviu terhadap realisasi capaian output DAK	6 Dokumen	4,100,000,000	
	Reviu Laporan Keuangan	Sumut	Jumlah laporan hasil reviu terhadap LKPD	1 Dokumen	500,000,000	Reviu Laporan Keuangan	Sumut	Jumlah laporan hasil reviu terhadap LKPD	1 Dokumen	500,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Sumut	Jumlah laporan hasil pemeriksaan pengawasan umum dan teknis pemerintah Kab/Kota	4 aspek pengawasan umum dan 4 urusan pengawasan teknis	16,000,000,000	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Sumut	Jumlah laporan hasil pemeriksaan pengawasan umum dan teknis pemerintah Kab/Kota	4 aspek pengawasan umum dan 4 urusan pengawasan teknis	16,000,000,000		
	Kerjasama Pengawasan Internal	Sumut	Jumlah laporan evaluasi SAKIP Kab/Kota dan PD serta Nilai EKPPD Kabupaten/Kota	3 Dokumen	5,800,000,000	Kerjasama Pengawasan Internal	Sumut	Jumlah laporan evaluasi SAKIP Kab/Kota dan PD serta Nilai EKPPD Kabupaten/Kota	3 Dokumen	5,800,000,000		
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Sumut	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI	84%	8,050,000,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Sumut	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI	84%	8,050,000,000		
			Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ltjen Kemendagri	100%				Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ltjen Kemendagri	100%			
			Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP	55%				Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP	55%			
			Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat	79%				Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat	79%			
			Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat	72%				Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat	72%			
			Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ltjen Kementerian dan Inspektorat Utama Lembaga	50%				Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ltjen Kementerian dan Inspektorat Utama Lembaga	50%			
			Jumlah Laporan Pengawasan/Pemeriksaan atas Kepatuhan	5 Laporan				Jumlah Laporan Pengawasan/Pemeriksaan atas Kepatuhan	5 Laporan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pengawasan/Pemeriksaan atas Dana BOS	18 Laporan				Jumlah Laporan Pengawasan/Pemeriksaan atas Dana BOS	18 Laporan		
			Jumlah Laporan Pengawasan/Pemeriksaan atas Dana Desa	22 Laporan				Jumlah Laporan Pengawasan/Pemeriksaan atas Dana Desa	22 Laporan		
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Sumut	Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat, limpahan instansi tingkat atas dan permintaan instansi terkait	72%	19,925,000,000	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Sumut	Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat, limpahan instansi tingkat atas dan permintaan instansi terkait	72%	19,925,000,000	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Sumut	Jumlah laporan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Daerah/Negara	2 Laporan	1,500,000,000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Sumut	Jumlah laporan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Daerah/Negara	2 Laporan	1,500,000,000	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Sumut	Jumlah laporan hasil Pengawasan/ Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Kab/Kota	72%	18,425,000,000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Sumut	Jumlah laporan hasil Pengawasan/ Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Kab/Kota	72%	18,425,000,000	
			Jumlah laporan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Serah Terima jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP)/Pejabat Administrator	13 Laporan				Jumlah laporan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Serah Terima jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP)/Pejabat Administrator	13 Laporan		
			Jumlah Laporan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Pelayanan Dumas	25 Laporan				Jumlah Laporan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Pelayanan Dumas	25 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Permintaan/Permohonan dari APH	25 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Permintaan/Permohonan dari APH	25 Laporan		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Pelimpahan/Penugasan dari Kementerian/Lembaga	25 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Pelimpahan/Penugasan dari Kementerian/Lembaga	25 Laporan		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Penyelesaian Kerugian Daerah	4 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Penyelesaian Kerugian Daerah	4 Laporan		
			Jumlah laporan hasil probity audit	5 Laporan				Jumlah laporan hasil probity audit	5 Laporan		
			Jumlah laporan hasil audit investigasi	3 Laporan				Jumlah laporan hasil audit investigasi	3 Laporan		
			Jumlah laporan hasil audit forensik	7 Laporan				Jumlah laporan hasil audit forensik	7 Laporan		
III	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Sumut			15,155,000,000	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Sumut			15,155,000,000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Sumut	Jumlah dokumen terkait kebijakan teknis pengawasan dan pembinaan	100%	3,655,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Sumut	Jumlah dokumen terkait kebijakan teknis pengawasan dan pembinaan	100%	3,655,000,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan:	Sumut	Tersedianya Program kerja pembinaan dan pengawasan tahunan (PKP2T)	1 Dokumen	1,020,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan:	Sumut	Tersedianya Program kerja pembinaan dan pengawasan tahunan (PKP2T)	1 Dokumen	1,020,000,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan:	Sumut	1.Level Kapabilitas APIP 2.Level Maturitas SPIP	1.Kapabilitas APIP Level 3+ 2.Maturitas SPIP Level 3,5	2,635,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan:	Sumut	1.Level Kapabilitas APIP 2.Level Maturitas SPIP	1.Kapabilitas APIP Level 3+ 2.Maturitas SPIP Level 3,5	2,635,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pendampingan dan Asistensi	Sumut	Persentase pembinaan dan pengawasan serta kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemerintah	100%	11,500,000,000	Pendampingan dan Asistensi	Sumut	Persentase pembinaan dan pengawasan serta kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemerintah	100%	11,500,000,000	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Sumut	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Pembinaan pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh Perangkat Daerah)	12 Laporan	350,000,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Sumut	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Pembinaan pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh Perangkat Daerah)	12 Laporan	350,000,000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Sumut	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8 Laporan	2,550,000,000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Sumut	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8 Laporan	2,550,000,000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Sumut	Nilai MCP KPK	91	4,600,000,000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Sumut	Nilai MCP KPK	91	4,600,000,000	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Sumut	nilai SPI	61	4,000,000,000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Sumut	nilai SPI	61	4,000,000,000	
					<b>180,000,000,000</b>						<b>180,000,000,000</b>

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan yaitu : (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemeratan (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya saing (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

#### B. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Provsu

##### 1. Tujuan

Tujuan dalam hal ini berlaku untuk kurun waktu Rencana Strategis Inspektorat 2019-2023. Tujuan Inspektorat sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2019-2023. RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perda Nomor 5 Tahun 2019. Terkait dengan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab Inspektorat, Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 yang berkenaan adalah misi kedua yakni **“Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya Pemerintah yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis”**. Misi ini sesuai lingkup Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi. Pada lingkup itu berarti misi berkenaan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam dimensi lain Gubernur juga berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah yang berwenang membina dan mengawasi secara umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. Sesuai ketentuan Pasal 3 jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 cakupan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota sangat luas, dan dilaksanakan oleh perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena perangkat itu belum terbentuk maka berlaku ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, yang mengamanatkan sebelum perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah belum terbentuk, maka kewenangan pembinaan dan pengawasan secara umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Perangkat Daerah unsur pengawasan. Ini berarti menjadi bagian tugas dari Inspektorat.

Tujuan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Inspektorat juga terkait dengan tugas-tugas Inspektorat yang diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai amanat asas-asas Urusan Pemerintahan yang baik dan larangan penyalahgunaan wewenang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan keuangan oleh perangkat daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai pengawasan APIP, pengawasan dan pembinaan perangkat daerah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengadaan Berang/Jasa serta penugasan untuk pengawasan dana Bos dan Dana Desa.

Dari uraian di atas tujuan dari pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Inspektorat dalam kurun waktu 2019-2023 terdiri dari:

- a. Terciptanya pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya.
- b. Terwujudnya harmonisasi capaian good governance dan clean governance antara pemerintahan provinsi sumatera utara dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara.
- c. Terwujudnya sinergitas hubungan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

## 2. Sasaran

Dari tujuan di atas maka sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat tahun 2019-2023 adalah:

- a. Minimnya pelanggaran pelaksanaan kewenangan oleh ASN;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas sumber daya daerah (keuangan, barang, SDM, dan Tata Kelola);
- c. Meningkatnya efektivitas, efisensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- d. Meningkatnya efektivitas penerapan SPIP;
- e. Meningkatnya kepatuhan terhadap etika dan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- f. Meningkatnya efektivitas, efisensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas dana desa;
- g. Meningkatnya efektivitas, efisensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas dana BOS;
- h. Meningkatnya efektivitas tata kelola DAK;
- i. Optimalnya pelaksanaan pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- j. Optimalnya pelaksanaan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- k. Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan termasuk NSPK;
- l. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kinerja OPD dan ASN; dan
- m. Meningkatnya sinergitas hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sesuai arah kebijakan pembangunan nasional Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia Maju, visi, misi, program prioritas dan tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, ketersediaan sumber daya manusia dan sarana Inspektorat, ketentuan peraturan, kurun waktu pencapaian RPJMD 2019-2023 yang tinggal 2 (dua) tahun dari 2022-2023, dan ketersediaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara, maka sejalan tekad dan komitmen perwujudan Sumatera Utara Bermartabat Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 terdiri dari :

1. Mempertahankan Opini WTP dan dukungan terhadap Kabupaten/Kota dalam mencapai opini WTP.
2. SAKIP memperoleh nilai BB.
3. Seluruh OPD masuk ke dalam Zona Integritas.
4. Maturitas SPIP memperoleh level 3 Plus.
5. Kapabilitas APIP memperoleh level 3.
6. Peringkat MCP masuk ke dalam 5 besar nasional.
7. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dapat terlayani sebanyak 70%.
8. Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan mencapai 85%.
9. Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat mencapai 85%.
10. Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen mencapai 100%.
11. Total kegiatan pembinaan dan pengawasan Dana Bos melingkupi 20% dari 1.642 Sekolah (328 Sekolah).
12. Total Pembinaan Dana Desa 5% dari 5.417 Desa (135 Desa)
13. Pelaksanaan Program dan kegiatan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan Anggaran Kas.
14. Sistem Kepegawaian yang lengkap.
15. Terlaksananya Pemeriksaan Gender.
16. Kerja yang lebih erat dengan APH, BPKP RI dan ORI.
17. Rapat kerja pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota minimal 3 kali dalam setahun.
18. Pengawasan pelaksanaan Program RB pada semua OPD.
19. Aparatur Inspektorat yang mengikuti pelatihan atau pengembangan diri minimal 30%.

20. Seluruh kegiatan pendukung pembinaan dan pengawasan harus memiliki Kerangka Acuan Kerja (KAK).
21. Peningkatan standardisasi kegiatan pendukung Pembinaan dan Pengawasan.
22. SOP dan Standar dilaksanakan dengan benar.
23. Penerapan Manajemen Resiko.

Rumusan Program/Kegiatan dan pagu indikatif Inspektorat Provinsi diuraikan pada tabel T-C.33. (Terlampir). Pagu Indikatif yang diusulkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk pelaksanaan 3 Program dan 12 Kegiatan adalah 180.000.000.000,- (Seratus delapan puluh milyar rupiah).

**Tabel T-C. 33.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**Provinsi Sumatera Utara**

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Kebutuhan	Sumber		Target	Kebutuhan
				Capaian	Dana/Pagu	Dana		Capaian	Dana/Pagu
				Kinerja	Indikatif			Kinerja	Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>INSPEKTORAT PROVINSI</b>				180,000,000,000				180,000,000,000
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				61,399,638,670				61,399,638,670
<b>6.01.01.1.01</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Sumut	100%	675,000,000	APBD		100%	675,000,000
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen renstra dan renja	Sumut	2 Dokumen	150,000,000	APBD		2 Dokumen	150,000,000
6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Sumut	1 Dokumen	25,000,000	APBD		1 Dokumen	25,000,000
6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA	Sumut	1 Dokumen	20,000,000	APBD		1 Dokumen	20,000,000
6.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Sumut	1 Dokumen	30,000,000	APBD		1 Dokumen	30,000,000
6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Sumut	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
6.01.01.1.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja	Sumut	1 Laporan	250,000,000	APBD		1 Laporan	250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Kebutuhan	Sumber		Target	Kebutuhan
				Capaian	Dana/Pagu	Dana		Capaian	Dana/Pagu
				Kinerja	Indikatif			Kinerja	Indikatif
<b>6.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Laporan keuangan dan kegiatan</b>	<b>Sumut</b>	<b>100%</b>	<b>46,007,384,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>46,007,384,000</b>
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sumut	14 Bulan	45,000,000,000	APBD		14 Bulan	45,000,000,000
6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sumut	1 Laporan	932,384,000	APBD		1 Laporan	932,384,000
6.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Sumut	1 Laporan	75,000,000	APBD		1 Laporan	75,000,000
<b>6.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Laporan penatausahaan barang</b>	<b>Sumut</b>	<b>100%</b>	<b>75,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>75,000,000</b>
6.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan barang	Sumut	6 Laporan	75,000,000	APBD		6 Laporan	75,000,000
<b>6.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya data administrasi ASN</b>	<b>Sumut</b>	<b>100%</b>	<b>3,823,755,200</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>3,823,755,200</b>
6.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Data administrasi ASN	Sumut	1 Dokumen	325,291,200	APBD		1 Dokumen	325,291,200
6.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Data sistem informasi kepegawaian	Sumut	1 Dokumen	72,000,000	APBD		1 Dokumen	72,000,000
6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Penilaian angka kredit APIP	Sumut	1 Dokumen	186,480,000	APBD		1 Dokumen	186,480,000
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai	Sumut	45 orang	3,000,000,000	APBD		50 orang	3,000,000,000
6.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	Sumut	7 orang	239,984,000	APBD		9 orang	239,984,000
<b>6.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana kantor</b>	<b>Sumut</b>	<b>100%</b>	<b>1,960,988,800</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1,960,988,800</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Kebutuhan	Sumber		Target	Kebutuhan
				Capaian	Dana/Pagu	Dana		Capaian	Dana/Pagu
				Kinerja	Indikatif			Kinerja	Indikatif
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sumut	12 Bulan	38,988,800	APBD		12 Bulan	38,988,800
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	Sumut	100%	500,000,000	APBD		100%	500,000,000
6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	Sumut	100%	150,000,000	APBD		100%	150,000,000
6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor	Sumut	12 Bulan	510,000,000	APBD		12 Bulan	510,000,000
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sumut	100%	146,000,000	APBD		100%	146,000,000
6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sumut	100%	16,000,000	APBD		100%	16,000,000
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sumut	5 Laporan	600,000,000	APBD		5 Laporan	600,000,000
<b>6.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya fasilitas operasional perkantoran</b>	<b>Sumut</b>	<b>100%</b>	<b>520,250,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>520,250,000</b>
6.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel dan alat kantor lainnya	Sumut	100%	500,000,000	APBD		100%	500,000,000
6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Sumut	4 buah	20,250,000	APBD		5 buah	20,250,000
<b>6.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Sumut</b>	<b>100%</b>	<b>4,495,893,200</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>4,495,893,200</b>
6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat	Sumut	25.100 surat	90,595,200	APBD		25.200 surat	90,595,200
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sumut	12 Laporan	1,300,000,000	APBD		12 Bulan	1,300,000,000
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jasa pelayanan umum kantor	Sumut	12 Laporan	3,105,298,000	APBD		12 Laporan	3,105,298,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Kebutuhan	Sumber		Target	Kebutuhan
				Capaian	Dana/Pagu	Dana		Capaian	Dana/Pagu
				Kinerja	Indikatif			Kinerja	Indikatif
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Sumut	100%	3,841,367,470	APBD		100%	3,841,367,470
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sumut	1 Laporan	325,720,484	APBD		1 Laporan	325,720,484
6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sumut	1 Laporan	394,699,878	APBD		1 Laporan	394,699,878
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sumut	1 Laporan	1,888,957,200	APBD		1 Laporan	1,888,957,200
6.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sumut	1 Laporan	1,231,989,908	APBD		1 Laporan	1,231,989,908
6.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>				103,445,361,330				103,445,361,330

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Kebutuhan	Sumber		Target	Kebutuhan
				Capaian	Dana/Pagu	Dana		Capaian	Dana/Pagu
				Kinerja	Indikatif			Kinerja	Indikatif
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan	Sumut	83%	83,520,361,330	APBD		85%	83,520,361,330
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase nilai rata-rata kinerja PD berdasarkan skala pengukuran kinerja	Sumut	61%	30,800,000,000	APBD		63%	30,800,000,000
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah	Sumut	16 Laporan	18,270,361,330	APBD		17 Laporan	18,270,361,330
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviuw terhadap LPPD dan Lakip Jumlah laporan hasil reviu terhadap realisasi capaian output DAK	Sumut	6 Dokumen	4,100,000,000	APBD		6 Dokumen	4,100,000,000
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu terhadap LKPD	Sumut	1 Dokumen	500,000,000	APBD		1 Dokumen	500,000,000
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemeriksaan pengawasan umum dan teknis pemerintah Kab/Kota	Sumut	4 aspek pengawasan umum dan 4 urusan pengawasan teknis	16,000,000,000	APBD		5 aspek pengawasan umum dan 4 urusan pengawasan teknis	16,000,000,000
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan evaluasi SAKIP Kab/Kota dan PD serta Nilai EKPPD Kabupaten/Kota	Sumut	3 Dokumen	5,800,000,000	APBD		3 Dokumen	5,800,000,000
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI	Sumut	84%	8,050,000,000	APBD		85%	8,050,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Kebutuhan	Sumber		Target	Kebutuhan
				Capaian	Dana/Pagu	Dana		Capaian	Dana/Pagu
				Kinerja	Indikatif			Kinerja	Indikatif
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ltjen Kemendagri		100%				100%	
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP		55%				60%	
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat		79%				80%	
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat		72%				75%	
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ltjen Kementerian dan Inspektorat Utama Lembaga		50%				55%	
		Jumlah Laporan Pengawasan/Pemeriksaan atas Kepatuhan		5 Laporan				6 Laporan	
		Jumlah Laporan Pengawasan/Pemeriksaan atas Dana BOS		18 Laporan				18 Laporan	
		Jumlah Laporan Pengawasan/Pemeriksaan atas Dana Desa		22 Laporan				24 Laporan	
<b>6.01.02.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat, limpahan instansi tingkat atas dan permintaan instansi terkait</b>	<b>Sumut</b>	<b>72%</b>	<b>19,925,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>75%</b>	<b>19,925,000,000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Kebutuhan	Sumber		Target	Kebutuhan
				Capaian	Dana/Pagu	Dana		Capaian	Dana/Pagu
				Kinerja	Indikatif			Kinerja	Indikatif
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Daerah/Negara	Sumut	2 Laporan	1,500,000,000	APBD		3 Laporan	1,500,000,000
6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan/ Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Kab/Kota	Sumut	72%	18,425,000,000	APBD		72%	18,425,000,000
		Jumlah laporan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Serah Terima jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP)/Pejabat Administrator		13 Laporan				13 Laporan	
		Jumlah Laporan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Pelayanan Dumas		25 Laporan				30 Laporan	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Permintaan/Permohonan dari APH		25 Laporan				30 Laporan	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Pelimpahan/Penugasan dari Kementerian/Lembaga		25 Laporan				30 Laporan	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Dalam Rangka Penyelesaian Kerugian Daerah		4 Laporan				5 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Kebutuhan	Sumber		Target	Kebutuhan
				Capaian	Dana/Pagu	Dana		Capaian	Dana/Pagu
				Kinerja	Indikatif			Kinerja	Indikatif
		Jumlah laporan hasil probity audit		5 Laporan				6 Laporan	
		Jumlah laporan hasil audit investigasi		3 Laporan				4 Laporan	
		Jumlah laporan hasil audit forensik		7 Laporan				8 Laporan	
6.01.03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>				15,155,000,000				15,155,000,000
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen terkait kebijakan teknis pengawasan dan pembinaan	Sumut	100%	3,655,000,000	APBD		100%	3,655,000,000
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan:	Tersedianya Program kerja pembinaan dan pengawasan tahunan (PKP2T)	Sumut	1 Dokumen	1,020,000,000	APBD		1 Dokumen	1,020,000,000
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan:	1.Level Kapabilitas APIP 2.Level Maturitas SPIP	Sumut	1.Kapabilitas APIP Level 3+ 2.Maturitas SPIP Level 3,5	2,635,000,000	APBD		1.Kapabilitas APIP Level 3+ 2.Maturitas SPIP Level 3,5	2,635,000,000
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase pembinaan dan pengawasan serta kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Sumut	100%	11,500,000,000	APBD		100%	11,500,000,000
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Pembinaan pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh Perangkat Daerah)	Sumut	12 Laporan	350,000,000	APBD		13 Laporan	350,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Kebutuhan	Sumber		Target	Kebutuhan
				Capaian	Dana/Pagu	Dana		Capaian	Dana/Pagu
				Kinerja	Indikatif			Kinerja	Indikatif
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Sumut	8 Laporan	2,550,000,000	APBD		8 Laporan	2,550,000,000
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai MCP KPK	Sumut	91	4,600,000,000	APBD		92	4,600,000,000
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	nilai SPI	Sumut	61	4,000,000,000	APBD		62	4,000,000,000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Tahun 2022 disusun sebagai dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun meliputi program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan capaian kinerja dan rencana kinerja anggaran pembinaan dan pengawasan sebagaimana tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara yang bermartabat diharapkan dukungan dari semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sehingga tercapai visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yaitu : “Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat”.